

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Hakim Siagian, 2014, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatuhan dalam Perlindungan Konsumen*, UMSU Press, Medan.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AZ. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Mandar, Bandung.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan nasional, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua* Balai Pustaka, Jakarta.
- Dhaniswara K. Hardjono, 2009, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat
- Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.H., M.Kn, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Elis Herlina dan Sri Santi, 2016, *Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar*, Hukum Ius Quia Iustum 23, no.3.

- Firmansyah Arifin (*et.all*), 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara* Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co 1990
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutalak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Janus Sinabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Putih Hitam Pengadilan Khusus* Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2013.
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belnap Press of Harvard University Pres, Cambridge.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya Bandung*, alumni.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta.

- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Erlies SeptianaNurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, Ed 1, Cet.1, : Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari hukum acara perdata serta kendala implementasinya*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sutan Remy Sahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Kencana, Jakarta
- Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Tarnyana Soenandar, 2001, *Tinjauan Atas Beberapa Apek Hukum Dari Prinsip-prinsip UNIDROIT dan SISG*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Trias Politica dikemukakan oleh Montesquieu (1588-1755) yang membedakan tiga fungsi otoritas publik, yaitu: pembentukan UU (Legislatif) pemerintah (eksekutif), dan peradilan (yudikatif). Lihat Ibrahim R, Pengawasan Konstitusional Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam Sistem Pemerintahan Amerika Serikat (Universitas Udayana 2000)

Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi Prektek Kejurusitaan Pengadilan Tatanusa*

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **C. Jurnal, Media Online, dan Putusan Pengadilan Negeri**

Abdul Halim Barkatullah, 14 April 2007 ,Urgensi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi di E-Commerce, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia No. 2 Vol.

Ari Purwadi, 2000, Telaah Singkat tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum & Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No.3 Vol. 3.

Dewi Ernita, Januari 2013, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi, No. 02 Vol. I

<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>, diakses 16 Maret 2016.